

**PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Mentebung Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau)**

Muhammad Rasdi¹, Imam Yudhi Prastya², Edison³

Email : Rasdi.shika@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Abstract

The success of a development in a society that is still traditional is determined by the involvement of the Informal leader and how the typology of the institutions in the area that will carry out the development. One form of involvement of informal leaders is how they act as a leader towards the community and village government and what are the dimensions of the institution they lead. The purpose of this study is to find out who the local leaders who influence development in the community, find out how their role to the community and village government is related to the development process carried out by the village government, know how the typology of informal institutions that exist in an area who are doing the development process. This research is a qualitative descriptive study conducted in Mentebung Village, Tambelan District, Bintan Regency, Riau Archipelago Province. Informants in this study include the village government, community and informal leaders themselves with a purposive sampling method so that the number of selected respondents is 25 people. Primary data were obtained by conducting interviews based on interview guidelines and secondary data obtained from books, archives, documents related to research. The results of this study indicate that there are informal leaders and informal institutions in the Desa Tebebung. This leader carried out his role on the village government and the community which turned out to make a positive impact on the development that would and was being carried out.

Keywords: *Development, Village, Informal leaders, Roles*

I. Pendahuluan

Pembangunan desa adalah salah satu pendukung untuk terciptanya pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tujuan pembangunan desa adalah menuju desa yang kuat, mandiri, makmur dan sejahtera. Kemudian dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembaingunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang secara ekplisit memberikan otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya untuk mempercepat lajunya pembangunan daerah dan tercapainya pemerataan pembangunan nasional. Untuk mensukseskan pembangunan desa yang masyarakatnya masih sangat tradisional seringkali ditentukan oleh keterlibatan pemimpin. Etzioni (1985) menjelaskan bahwa pemimpin dapat dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Etzioni menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin informal adalah seorang

individu yang mampu mengendalikan bawahan berdasarkan kekuatan pribadinya. Kemudian Winardi dalam Patton (2005) mengatakan bahwa pemimpin informal adalah seorang atau sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai dirinya (*diri mereka*) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Kemudian kartodirjo (1986) juga menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat secara wajar timbullah dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya, yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan kelompok yang dipimpin, ialah orang kebanyakan. Kartodirdjo juga menjelaskan bahwa akibat adanya interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan faktor situasional akan menghasilkan pemimpin. Hal ini oleh Kartodidjo disebut sebagai teori kepribadian dalam situasi. Lebih rinci lagi ialah bahwa kepemimpinan adalah pertemuan antara pelbagai faktor : (1) Sifat dan golongannya, (2) Kepribadian dan (3) Situasi atau Kejadian.

Keterlibatan pemimpin-pemimpin ini akan menghasilkan suatu peran. Siagian (2010:48) menjelaskan terdapat lima peran pemimpin. Pertama, sebagai penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara terencana dan bertahap. Kedua, sebagai wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain. Ketiga, sebagai komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi. Keempat, sebagai mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi. Kelima, sebagai integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

Berdasarkan teori pemimpin dan peranan pemimpin, jelaslah terlihat bahwa keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu kelompok masyarakat untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini adalah pelaksanaan proses pembangunan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh pemimpin informal yaitu kepala desa. Namun pemimpin informal yang memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat dan memiliki modal yang lebih kuat dari pemimpin formal. Hal ini mengakibatkan butuhnya suatu koordinasi kerja sama antara pemimpin informal dan pemimpin formal yang ada agar pembangunan yang dilaksanakan akan mencapai tujuannya dan mempercepat terjadinya pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemimpin informal tentu juga menciptakan keberadaan institusi informal. Tipologi dari keberadaan institusi informal ini juga akan mempengaruhi terhadap proses pembangunan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, tipologi adalah watak tentang bagian manusia dalam golongan menurut sifat masing-masing.

Kemudian Helmke dan Levitski menjelaskan bahwa tipologi institusi informal ini terbagi atas empat. Pertama, institusi informal saling melengkapi yaitu, institusi informal yang berdampingan dengan institusi formal yang efektif akan mengisi kesenjangan baik sekedar kontingensi yang tidak diatur dalam aturan formal ataupun memfasilitasi untuk mengejar tujuan individu dalam formal kerangka institusional. Atau dengan kata lain institusi informal merupakan institusi pelengkap yang berfungsi sebagai dasar untuk institusi formal, menciptakan atau memperkuat insentif untuk mematuhi aturan-aturan formal yang mungkin hanya ada di kertas. Kedua, institusi informal

akomodatif yaitu Institusi informal akomodatif sering dibuat oleh aktor-aktor yang tidak suka hasil yang dihasilkan oleh aturan-aturan formal tetapi tidak dapat mengubah atau terang-terangan melanggar aturan-aturan. Dengan demikian, mereka sering membantu untuk mendamaikan kepentingan aktor dengan pengaturan institusi formal yang ada. Ketiga, Institusi informal Bersaing yaitu Institusi informal yang tumbuh berdampingan dengan Institusi formal yang tidak efektif akan menghasilkan Institusi informal bersaing. Institusi ini sering ditemukan dalam konteks pasca kolonial di mana institusi-institusi formal yang dikenakan pada aturan adat dan struktur otorita dengan kata lain untuk mengikuti aturan aktor harus melanggar aturan lainnya. Keempat, Institusi informal substitusi yaitu, Institusi informal yang berdampingan dengan institusi formal tidak efektif dan hasil yang kompatibel, sesuai dengan substitusi institusi resmi seperti institusi pelengkap. Institusi informal substitusi dipekerjakan oleh pelaku yang mencari hasil kompatibel dengan aturan dan prosedur formal. Seperti institusi bersaing, namun ada dalam lingkungan di mana aturan-aturan formal tidak ditegakkan secara rutin. Oleh karena itu, institusi informal substitusi mencapai apa yang institusi formal rancang, namun gagal, untuk mencapainya.

Berdasarkan kondisi desa yang minim sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan ditambah dengan kebudayaan-kebudayaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat desa menyebabkan pemimpin informal lebih berpengaruh dari pada pemimpin formal yaitu kepala desa. Pemimpin informal memiliki modal yang lebih kuat dan memiliki legitimasi secara langsung dari masyarakat sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa

Oleh karena itu untuk mensukseskan pembangunan di desa mentebung ini sangat dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang serasi antara pemerintah desa dengan pemimpin-pemimpin informal mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan agar mendapat dukungan dari masyarakat sehingga pembangunan akan mencapai tujuan yang ditetapkan dan mendukung tercapainya program pemerataan pembangunan nasional.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut teori sugiyono dan silalahi yang kesimpulan dari kedua teorinya adalah metode ini mengacu pada sekumpulan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi sehingga dapat dikelompokkan kemudian dianalisis dengan melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fokus dari penelitian ini yang akan menggambarkan bagaimana peran dari seorang pemimpin informal dalam pembangunan desa dan bagaimana tipologi dari institusi informal yang ada. Penelitian ini dilakukan di desa Mentebung kecamatan Tambelan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling menurut sugiyono (2011) dan yang menjadi informan berjumlah 25 orang terdiri dari kepala desa dan kepala BPD, kemudian 20 masyarakat yang tinggal di desa kurang lebih 10 tahun dan terakhir 3 orang pemimpin informal. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan teori menurut Miles dan Hubberman dalam sugiyono (2011) yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Objek dari penelitian ini adalah Pemimpin Informal yang akan dilihat berdasarkan perannya sebagai pemimpin dalam masyarakat dan bagaimana tipologi dari institusi informal tersebut

terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mentebung, Kecamatan Tambelan, Provinsi Kepulauan Riau

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan terletak pada posisi geografis 106021'00" - 107059'00" LU dan 0050'00" - 1021'00" BT, memiliki luas kawasan 169,42Km daratan dan 23,496 Km lautan. Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan Tambelan dengan ibukota kabupaten yaitu berjarak 340 Km dengan jarak tempuh 24 jam. Dan antar desa terjauh yaitu 90 Km dengan jarak tempuh 8 jam. Jumlah Pulau - pulau yang ada di Kecamatan Tambelan sebanyak 56 pulau yang tersebar pada wilayah Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Pulau-pulau ini terdiri dari pulau yang sudah berisi dan pulau yang masih kosong. Adapun pulau yang sudah di Huni berjumlah 7 buah Pulau dan belum di Huni sebanyak 49 buah Pulau yang dibagi dengan 7 Desa dan 1 Kelurahan.

Desa mentebung adalah salah satu desa dari kecamatan Tambelan, memiliki luas sebesar 16,30 Km daratan dan 2,405 Km lautan dengan jumlah kartu keluarga sebesar 102 Orang. Mayoritas pekerjaan penduduk didesa ini adalah sebagai Nelayan. Untuk menunjang perekonomian desa ini memiliki 3 toko kecil yang dijadikan sebagai pasar. Sarana pendidikan didesa hanya memiliki satu buah sd yaitu sdn 006 Desa mentebung dan merupakan sd satu atap dengan pulau pinang. Dengan sarana pendidikan yang minim ini mengakibatkan tingkat pendidikannya rendah. Dan angka yang tidak tamat sd sangat tinggi yaitu 100 orang dari 362 orang yang ada di desa mentebung dan jumlah buta huruf mencapai angka 33 orang. Dari bidang kesehatan desa ini memiliki puskesmas pembantu, posyandu dan polindes. Adapun perbatasan antar desa ini yaitu : Utara: Provinsi Bangka, Barat: Desa Pl.Pinang, Selatan:Desa Pl. Pengikik, Timur:Kecamatan Tambelan. Akses Untuk menuju ke Desa Mentebung Kecamatan Tambelan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dan membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam menggunakan kapal ikan ataupun pompong kecil milik warga. Tidak adanya sarana khusus untuk akses menuju desa mentebung membuat daerah ini menjadi daerah yang terisolasi dan tertinggal.

Pada awalnya Pulau Mentebung, Pengikik, dan Pulau Pinang hanya dihuni oleh empat kepala keluarga Suku Laut yang berasal dari Lingga, yang dulunya Pusat Kerajaan Riau Lingga hal inilah yang menyebabkan Perilaku kebudayaan di pulau Pengikik, Mentebung dan Pulau Pinang hampir mirip. Salah satu fenomena yang berhubungan dengan pemimpin informal adalah Desa mentebung dulunya dipimpin oleh kepala suku yang memiliki 20 ulu balang atau bawahan. Semua proses kegiatan selalu dipimpin oleh kepala suku seperti pernikahan, pengobatan dll. Kemudian sistem kepala suku ini mulai dihilangkan dan digantikan menjadi kepala desa dan ketua adat yang memiliki surat keterangan dari pemerintah desa. Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat mentebung memiliki kebudayaan untuk percaya terhadap pemimpin sendiri atau disebut dengan pemimpin informal.

Kebudayaan percaya kepada tokoh adat atau pemimpin infromal tentunya akan mempengaruhi pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Mengingat kebudayaan ini sangat kuat didesa mentebung sehingga sangat dibutuhkannya suatu penelitian untuk memberikan keterangan kepada pemerintah desa dan pemimpin informal serta masyarakat. Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan di desa mentebung:

Pemimpin Informal Pilihan Masyarakat Di Desa Mentebung.

Pemimpin informal dalam penelitian ini adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat didesa mentebung dan mereka juga termasuk dalam responden penelitian ini. Pemilihan ini tidak seperti pemilihan suara pada umumnya tetapi pemilihan ini sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat itu sendiri. Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 2

pemerintah desa yaitu Kepala desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 20 responden dari masyarakat yaitu 10 perempuan dan 10 laki-laki yang menetap sudah lebih dari 10 Tahun, , dan 3 orang pemimpin informal yang diakui oleh masyarakat.

Kemudian responden dari masyarakat ini adalah responden yang sangat mengenal pemimpin informal dan cukup berpengaruh dalam masyarakat serta ada beberapa dari responden yang masih memiliki ikatan keluarga kepada pemimpin informal. Responden ini dipilih karena mereka kesehariannya sangat sering berinteraksi kepada pemimpin informal. Responden ini juga bertugas untuk memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

Karakteristik Pemimpin Informal Di Desa Mentebung Kecamatan Tambelan

Pemimpin informal LH adalah penduduk asli Desa Mentebung dan beliau adalah tokoh yang paling terkenal di masyarakat mentebung. LH sangat mengetahui tentang sejarah-sejarah desa mentebung dan bagaimana perkembangan desa mentebung dari zaman masih dipimpin oleh kepala suku sampai kepala desa sekarang. LH juga mengakui bahwa dia pernah menjabat sebagai ketua adat setelah dia diamanahkan untuk menjadi ketua adat oleh HA (keturunan kepala suku) dikarenakan HA tidak bisa menetap lagi di desa mentebung. Faktor sifat dan golongannya, LH memiliki sifat yang ramah dan peduli kepada masyarakat desa mentebung kemudian dengan kepribadian yang tenang dan adil bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah.

Pemimpin informal IK adalah seseorang yang lahir dan besar didesa Mentebung. Mengetahui bagaimana perkembangan desa dari tahun-ketahun serta aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa dan mau mendengar keluhan warga di Desa Mentebung. hal itu membuat IK terpilih untuk menjadi salah satu ketua RT di desa mentebung dan jabatan ini sudah melekat hampir 2 periode Kepala Desa. Kepemimpinan dan kepedulian IK didesa tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan besar seperti musrendes dan musrenbang tetapi dimulai dari hal-hal kecil seperti menjenguk dan membantu masyarakat yang sakit, atau yang butuh pertolongan bahkan musyawarah -musyawarah kecil seperti bertukar fikiran tentang pembangunan di desa pun IK selalu hadir dikarenakan rumah IK adalah tempat masyarakat biasa berkumpul sehingga informasi-informasi desa bisa mudah didapatkan oleh IK. faktor sifat dan golongan, sifat IK yang peduli terhadap masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi hal ini terbukti dengan selalu berusaha hadir jika ada masyarakat sedang kesusahan dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa telepon laut. Faktor kepribadian, kepribadian IK yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, hal ini terbukti dengan IK selalu menjadi pembicara saat melakukan musyawarah di desa yang mana suara tersebut merupakan kumpulan ide-ide dari masyarakat-masyarakat didesa mentebuing. Dan faktor situasi dan kejadian, yaitu masyarakat butuh seseorang yang mampu diandalkan untuk mewakili mereka dan terlihat jelas bahwasanya IK mampu merealisasikan keinginan tersebut

Am adalah penduduk yang lahir dan besar di Desa Mentebung Kecamatan Tambelan, Am juga di hormati di desa dikarenakan memiliki kerabat keluarga yang paling banyak dan dikenal sebagai seorang yang paling taat beragama. Am disebut sebagai tokoh agama dikarenakan Am selalu dipercayakan untuk masalah keagamaan mulai dari menjadi ketua pengurus masjid, menjadi imam, sampai kepada mengurus jenazah. Sifat dan golongan, sifat AM yang santun, arif dan bijaksana dalam memberikan ceramah-ceramah serta masukan terhadap masyarakat. Kepribadian dan Situasi, kepribadian AM yang peduli dan selalu bersedia hadir dalam permasalahan desa serta menginginkan keamanan didesa baik secara lisan ataupun perbuatan. Situasi atau Kejadian, AM adalah satau orang yang mampu menenangkan warganya jika terjadi suatu pertikaian hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam sebuah desa yang masyarakatnya masih sangat tradisional.

Tipologi institusi Informal di Desa Mentebung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa mentebung menunjukkan bahwasanya institusi informal dan institusi formal di desa mentebung saling berkoordinasi dalam melaksanakan proses pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian tugas kerja oleh pemerintah desa dan pemimpin informal dalam melaksanakan proses pembangunan dan mampu bekerja sama dalam memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi desa. Serta tidak saling menjatuhkan antara pemerintah desa dan pemimpin informal dan saling mendukung terhadap peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat agar masyarakat lebih teratur dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap desanya sendiri. Hal ini sesuai dengan tipologi informal saling melengkapi menurut teori Helmke dan Levitski.

Peran Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Di Desa Mentebung.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bab IX tentang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan yang tertulis dalam pasal 80. Poin pertama yaitu perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat dan poin kedua yaitu dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa

Pembangunan di desa mentebung berawal dari musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kepala BPD selaku panitia kegiatan musrenendes. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang di kecamatan Tambelan untuk menentukan keputusan perencanaan pembangunan. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan pembangunan dan kemudian barulah melakukan musyawarah terkait dengan evaluasi proses dan hasil dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Kepala desa selaku ketua dari kegiatan-kegiatan seperti musrenendes dan musrenbang selalu melibatkan pemimpin informal seperti LH, IK dan AM hal ini dikarenakan wilayah desa yang kecil dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pembangunan dikarenakan subjek pembangunan adalah masyarakat dan jika masyarakat sudah mendukung tentunya pembangunan akan mudah dilaksanakan.

Dalam proses Perencanaan Pembangunan Khususnya Musrenendes dan Musrenbang, pemimpin Informal yaitu LH, IK dan AM selalu di undang oleh panitia kegiatan musrenendes ataupun musrenbang hal ini dikarenakan LH mengetahui kondisi desa terutama terkait masalah kepemilikan tanah dan sejarah-sejarah desa yang tentunya akan berguna dalam hal negosiasi kepemilikan tanah untuk pembangunan tersebut. IK merupakan pemimpin informal yang paling banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, IK selalu memberikan kontribusi ide-ide, masukan dan menyampaikan aspirasi masyarakat-masyarakat dalam musrenendes maupun musrenbang. IK merupakan orang yang berani berbicara dan menentang jika menurutnya hal tersebut merugikan masyarakat dan dalam masyarakat tradisional tidak banyak yang berbicara apalagi menentang sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hal inilah yang membuat IK harus selalu hadir dalam setiap yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Sedangkan tugas utama AM adalah mengawasi masyarakat-masyarakat yang ikut didalam musyawarah sehingga meminimalisir pertikaian-pertikaian dan perbedaan pendapat.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Salah satu kontribusi pemimpin informal dalam pembangunan yaitu Kepala desa selalu memberikan tugas untuk merekrut dan mengumpulkan masyarakat-masyarakat dari dalam desa yang ingin ikut bekerja dalam pembangunan kepada pemimpin informal yaitu LH, IK dan AM. Tidak hanya merekrut dan mengumpulkan masyarakat yang ingin bekerja tetapi mereka juga merincikan berapa gaji dan bagaimana pembagian tugas dalam melaksanakan pembangunan. Bahkan jika pembangunan yang akan dilakukan berada di atas tanah warga maka itu juga merupakan tugas pemimpin informal untuk melakukan negosiasi terhadap masalah tanah tersebut. Hal ini dilakukan agar kejadian-kejadian lama seperti pertikaian

terkait masalah tanah tidak terjadi lagi dan pembagian masalah nego siasi tersebut tergantung dari pemimpin informal mana yang paling memiliki pengaruh terhadap pemilik tanah.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Pemimpin Informal berperan sebagai orang yang memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan karena pemimpin informal ikut berperan didalam melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini juga menemukan poin-poin untuk mendeskripsikan teori peranan dari siagian yaitu sebagai berikut :

Pertama, sebagai penentu arah. Peran pemimpin informal terkait sebagai penentu arah dalam proses pembangunan adalah memberi masukan kepada pemerintah Dalam institusi informal berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun ide pribadi dan mengajak masyarakat bermusyawarah dalam hal terkait pembangunan. Seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana melaksanakannya. Kemudian hadil musyawarah tersebut disampaikan kepada pemerintah desa dan kemudian dirundingkan didalam musrendes dan diputuskan didalam musrenbang.

Dalam proses pembangunan desa menunjukkan bahwa pemimpin informal tidak memiliki wewenang apapun untuk pengambilan keputusan sesuai menurut teori siagian. Pemimpin informal hanya bisa mengambil keputusan didalam institusi informalnya sendiri dan tidak menyangkut pembangunan namun hanya sebagai pendukung keputusan dari pemerintah desa sesuai dengan tipologi yang ditemukan didalam penelitian ini yaitu tipologi saling melengkapi menurut helmke dan levitsky.

Institusi informal ini juga tidak memiliki visi dan misi secara khusus, umumnya pemimpin informal didesa ini menyatakan bahwa mereka dan masyarakat hanya berperan sebagai pendukung dan pengawas dalam pembangunan desa agar pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal yang berdampak postifi bagi masyarakat luas.

Kedua, sebagai wakil dan juru bicara. Peran pemimpin informal terkait sebgai wakil dan juru bicara dalam proses pembangunan di desa mentebung bisa terlihat dengan jelas, khususnya kepada tokoh informal IK, bahkan pemimpin informal lain memberikan kepercayaan kepada IK untuk mewakili suara dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan modal yang dimiliki oleh pemimpin informal IK. Pemimpin informal di desa mentebung juga berperan sebagai penengah atau menjembatani antara mayarakat dan pemerintah desa. Hal ini terlihat dengan seringnya dilakukan bermusyawarah antara pemimpin informal dengan masyarakat, kemudian jika ditemukan sesuatu yang memiliki sifat kepentingan luas maka pemimpin informal akan menyampaikan masukan tersebut kepada pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ketiga pemimpin informal yaitu LH, AM dan IK. Ketiganya menyatakan bahwa setiap pemimpin informal dan masyarakat bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pemerintah desa jika ditemukan hal-hal yang berdampak buruk terhadap desa. Namun jika mengenai suatu keputusan maka pemimpin informal lah yang akan menjadi penghubung, baik itu kepentingan antara sesama masyarakat ataupun masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan mengingat seluruh masyarakat desa adalah keluarga dan agar kekompakan yang sudah ada selalu terjaga.

Ketiga, sebagai komunikator. Peran pemimpin informal terkait komunikator dalam proses pembangunan adalah disaat memiliki waktu luang pemimpin informal selalu mengajak masyarakat berkumpul, bercerita dan bermusyawarah. Hal ini bisa terlaksana dikarenakan budaya masyarakat yang senang berkumpul ditambah dengan banyaknya waktu luang bagi masyarakat yang mayoritas pekerjaan penduduk didesa mentebung adalah nelayan dekat. Berdasarkan wawancara dari ketiga pemimpin informal, ketiganya sepakat bahwa hal ini sengaja dilakukan dan dibudayakan untuk menjaga kekompakan masyarakat desa mengingat seluruh masyarakat adalah satu suku dan semuanya keluarga ditambah wilayah pemukiman desa yang tidak terlalu besar.

Setelah mengetahui dan bermusyawarah dengan masyarakat kemudian peran pemimpin informal selanjutnya adalah menyampaikan ataupun mengajak pemerintah desa untuk bermusyawarah. Sama dengan hal sebaliknya jika pemerintah akan melaksanakan suatu kegiatan maka pemerintah desa akan menunjuk pemimpin informal sebagai ketua masyarakat dan menjelaskan secara detail tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan pemimpin informal bertugas untuk membagi masyarakat sesuai dengan keahlian masing.

Keempat, sebagai mediator. Peran pemimpin informal terkait sebagai mediator dalam pembangunan desa terlihat dengan jelas. hal ini juga sudah dijelaskan di bab karakteristik pemimpin informal dalam penelitian ini. Pemimpin informal berperan sesuai keahlian masing-masing. LH dengan hal sejarah desa, IK dengan kemampuan berorganisasinya dan AM dengan kemampuan dalam bidang agamanya.

Salah satu peran pemimpin informal sebagai mediator adalah sebagai negosiator antara pemerintah desa dan masyarakat desa baik terkait masalah tanah, upah dan masalah pembagian pekerjaan. Pemimpin informal juga berperan sangat penting jika terjadi perselisihan. Mereka mampu menjadi penengah antara masyarakat dengan pemerintah desa dan antar sesama masyarakat. Budaya dari kepemimpinia kepala suku membuat pemimpin informal sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat desa ini sehingga peran pemimpin informal sangat dibutuhkan sebagai mediator di desa ini.

Kelima, sebagai integrator. Peran pemimpin informal terkait integrator dalam pembangunan adalah mereka bertugas menjelaskan kepada suatu kelompok ataupun masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dalam suatu keputusan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, desa mentebung juga memiliki beberapa individu-individu yang keras dalam berpendapat. Hal ini merupakan salah satu keberadaan pemimpin informal sangat dibutuhkan. Pemimpin informal mampu menenangkan individu-individu yang berbeda pendapat meskipun tidak selalu berhasil namun desa ini tidak pernah memiliki kelompok-kelompok yang menetnang dari keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Peran pemimpin informal sebagai integrator juga terlihat dalam pelaksanaan penetapan keputusan yang akan disampaikan kepada pemerintah desa. pemimpin informal dan masyarakat bermusyawarah hingga akhirnya menemukan suara terbanyak untuk menetapkan keputusan. Peran pemimpin informal tidak hanya sebagai wakil bicara masyarakat tapi juga menjelaskan dan memastikan agar memahami dan setuju terhadap keputusan yang diambil kepada individu-individu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang memiliki perbedaan pendapat. Hal ini dilaksanakan agar desa tidak memiliki suatu kelompok-kelompok yang dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat desa dan pembangunan serta menjaga kekompakan desa mengingat wilayah desa yang sangat kecil sehingga memudahkan untuk mengontrol seluruh masyarakat yang ada di desa ini.

IV. Kesimpulan

Dalam melaksanakan proses pembangunan ketiga pemimpin informal ini bekerja sama terhadap pemerintah desa. Dalam perencanaan pembangunan pemimpin informal berperan sebagai penyumbang ide-ide dan masukan-masukan dari warga serta memberikan penjelasan terkait keputusan perencanaan kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa. Dalam proses pelaksanaan pemimpin informal berperan sebagai perekrut masyarakat-masyarakat yang ingin ikut bekerja serta mengawasi proses pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dan ada salah satu pemimpin informal yang juga ikut bekerja dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam tahap evaluasi pemimpin informal berperan sebagai penyampai pesan jika terdapat permasalahan dalam pembangunan. Pemimpin-pemimpin informal ini juga berperan sesuai dengan teori siagian yaitu sebagai sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara, komunikator, mediator dan integrator.

Sedangkan dalam menentukan tipologi institusi informal. Peneliti menemukan bahwa tipologi dari institusi yang terdapat di desa Mentebung berdasarkan teori Helmke dan Levitskiy adalah Institusi informal saling melengkapi. Hal ini terlihat dari setiap peraturan yang dikeluarkan oleh desa akan didukung dan diawasi oleh institusi informal yang dalam penelitian ini disebut dengan pemimpin informal yaitu LH IK dan AM. Sedangkan tipologi yang lain berdasarkan dari teori Helmke dan Levitsky tidak ditemukan.

Akibat dari peran pemimpin informal dan tipologi institusi informal yang ada di desa mentebung, pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah desa selalu mendapat respon yang baik oleh masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan dan tentu saja hal ini sangat positif bagi perkembangan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui program pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh negara.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Abednoge, B. P.2015. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Pante Deere Kecamatan Kabola Kabupaten Alor
- Casey, Kimberly L. 2008. Defining Politic Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory
- Helmke, G and Levitsky, S. 2004. Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. American Political Science Association
- Kartodirjo, Sartono. 1986. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES

- Kartono, K. 2010. Pemimpin Dan Kepemimpinan : apakah kepemimpinan abnormal itu ?. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi Dan Pembangunan daerah : Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. K. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, Adri, 2005. Peran Pemimpin Informal dalam Pelaksanaan Pembangunan Persada, Cet. Ke – 35, h. 243
- Pesoth Welly, Laloma Alden, Michael R. L. 2013. Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Malola.
- Siagian, Sondang P. 2010. Teori & Praktek Kepemimpinan. Rineka Cipta : Jakarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Undang-undang :

- Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.